

ABSTRAK

ENOK IPAHA SARIPAH: *Penerapan Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah Terhadap Produk Pembiayaan Unit Mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung.*

Unit mikro adalah salah satu produk di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung yang menggunakan akad *murabahah*, dan pembelian barang yang akan dijual kepada nasabah bank mewakilkannya kepada nasabah, atas dasar prinsip *wakalah*. Akan tetapi, dalam praktiknya bank sering mengambil jalan pintas dan kurang memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum syara' sehingga praktik tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum syara'.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah*, selain itu juga untuk mengetahui dasar pertimbangan pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah pada produk pembiayaan unit mikro, dan untuk mengetahui kesesuaian fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* pada produk pembiayaan unit mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan peristiwa yang terjadi di lapangan. Data primer dihasilkan dari pengumpulan data yang dilakukan dengan teknik observasi, wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan arsip lainnya yang relevan dengan kegiatan penelitian.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa pembelian objek *murabahah* dapat dilakukan oleh pembeli *murabahah* tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad *wakalah* atau perwakilan. Setelah akad *wakalah* selesai dan objek *murabahah* tersebut secara prinsip telah sempurna menjadi milik bank, maka terjadi akad kedua antara bank dengan pembeli, yaitu akad *murabahah*, sehingga dalam melakukan akad harus dilakukan secara terpisah. Apabila salah satu yang menjadi rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka kedudukan akad itu menjadi tidak sah.

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa praktik pembiayaan unit mikro dengan menggunakan akad *murabahah* disertai *wakalah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Kopo Bandung, yaitu bank melakukan akad *murabahah* dengan objek akad, belum sempurna dimiliki oleh bank, hal itu karena bank baru akan mewakili pembelian objek akad setelah penandatanganan akad. Sementara akad *murabahah* dilakukan bersamaan dengan akad *wakalah*.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan unit mikro di Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Pembantu Kopo Bandung dengan menggunakan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* pada praktiknya belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu yang menjadi rukun dan syarat akad *murabahah*, maka akad *murabahah* tersebut menjadi tidak sah.